



BANK BAHTERA MASYARAKAT

P E R E K O N O M I A N R A K Y A T

PT BPR Bahtera Masyarakat

Kantor Pusat :

Gedung Top Center (Lantai 6)

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 13 - 13A

Jakarta Pusat 10130

Telp. (021) 6303535

Fax. (021) 6307521

Jakarta, 26 Januari 2026

Nomor : 012/PT.BPR-BM/OJK/I/2026
Lampiran : Berkas
Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Bahtera Masyarakat
dan Laporan *Self Assesment semester II* tahun 2025

Kepada. Yth:
Deputi Direktur
Otoritas Jasa Keuangan – KR 1Jabodebek
Pengawasan Bank Gedung Soemitro Djoyodikusumo Lt. 8
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4
Jakarta Pusat 10710

Dengan hormat,

Sesuai dengan POJK No.9 thn 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola BPR serta Laporan Self-Assessment yang merupakan bagian dari Laporan Penerapan Tata Kelola. Adapun tindak lanjut berikutnya adalah kami akan mengeluarkan Laporan Tata Kelola PT. BPR Bahtera Masyarakat tahun 2025 yang selanjutnya akan dsampaikan kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Asosiasi BPR di Indonesia
3. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan

Demikian surat ini kami sampaikan Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT BPR Bahtera Masyarakat



Hamrizal Razali
Direktur Utama



Handy Setyawan
Direktur

Tembusan :

- Asosiasi BPR _ Perbarindo
- Dewan Komisaris PT BPR Bahtera Masyaakat
- Arsip



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BPR BAHTERA MASYARAKAT
SEMESTER 2 TAHUN 2025

A. Ringkasan hasil penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

PT BPR Bahtera Masyarakat telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara umum dengan cukup baik selama Semester 2 tahun 2025. Direksi dan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi, yang terdiri dari dua orang, telah memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menyusun rencana bisnis secara realistis, menindaklanjuti hasil audit, serta menetapkan kebijakan internal yang mendukung penerapan tata kelola. Fungsi kepatuhan, manajemen risiko, audit internal, serta program APU-PPT telah dijalankan secara aktif.

Dewan Komisaris, juga terdiri dari dua orang, berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian masukan kepada Direksi serta menunjukkan kehadiran penuh dalam setiap rapat. Rekomendasi strategis diberikan untuk peningkatan layanan, penyaluran kredit, digitalisasi produk, dan penguatan manajemen risiko. Bank tidak membentuk komite karena tidak diwajibkan oleh ketentuan (modal inti < Rp 50 miliar). Kepemilikan saham mayoritas berada pada Komisaris Utama, sementara Direksi tidak memiliki saham. Tidak ditemukan adanya hubungan keluarga atau keuangan antar pengurus maupun dengan pemegang saham. Remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris telah ditetapkan melalui RUPS dengan nilai yang wajar dan transparan. Rasio gaji juga masih dalam batas kewajaran.

Selama periode pelaporan, tidak ditemukan kasus penyimpangan internal (*fraud*) maupun transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Tidak terdapat pemberian dana sosial atau politik sepanjang semester ini, mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas dan netralitas.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1	Nama	:	Hamrizal Razali
	NIK	:	1271032612630003
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:		
<p>a. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>b. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan telah memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Satuan Kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional Bank, dan Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif</p>			



<p>yang melaksanakan Fungsi Audit Internal, Manajemen Risiko, APU-PPT dan Kepatuhan.</p> <p>c. Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025 secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Direksi telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan Semester 2 tahun 2025 kepada Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris.</p> <p>e. Direksi senantiasa menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>f. Direksi telah menyusun dan melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat peraturan etika Kerja, waktu Kerja dan pengaturan rapat.</p>

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
2	Nama	: Handy Setyawan
	NIK	: 3173031905760005
	Jabatan	: Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat/opini, terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang mungkin kurang sesuai dengan POJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.</p> <p>b. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK dan Otoritas lain.</p> <p>c. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit Kerja terkait mengenai POJK terkini dan peraturan lain yang relevan.</p> <p>d. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.</p> <p>e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan Direksi lainnya (jika ada).</p> <p>f. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan/jenjang organisasi, termasuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit serta memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai.</p> <p>g. Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan internal dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari POJK dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>h. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur APU-PPT dan Manajemen risiko sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan sehingga dapat meminimalkan risiko dengan membangun budaya kepatuhan Bank.</p>	
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <p>a. Melakukan penagihan kredit hapus buku dengan lebih optimal.</p> <p>b. Menetapkan langkah-langkah perbaikan kredit NPL dengan cara penyampaian hasil kunjungan debitur setiap hari oleh collector/remedial.</p> <p>c. Menerapkan pelaksanaan program APU PPT dan monitoring terhadap pengkinian profile nasabah.</p> <p>d. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko secara menyeluruh.</p>	



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Ronald Karamoy
	NIK	: 3171020210840005
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>g. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku</p>		
2.	Nama	: Adhi Triono
	NIK	: 3174060212760011
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab:	
<p>a. Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.</p> <p>f. Dewan Komisaris telah membentuk Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.</p> <p>g. Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Eksternal, Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan pengawas otoritas lainnya.</p> <p>h. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.</p>		



Rekomendasi kepada Direksi:

- a. Mempertahakan debitur/nasabah existing yang memiliki predikat yang baik dan/atau yang lebih dari satu kali perpanjangan (debitur) diberikan special rate.
- b. Melakukan perubahan peraturan dan prosedur dalam rekomendasi atau pemberian kredit karyawan berdasarkan KPI (kuantitatif) disertai dengan bukti, batasan plafond, tenor, suku bunga yang didasari profil risiko karyawan berdasarkan status kepegawaian, masa kerja, DSR, KPI, dan SLIK di tempat lain.
- c. Melakukan pengembangan produk lanjutan dalam kegiatan usaha BPR Bahtera Masyarakat terkait dengan layanan pembukaan rekening Tabungan dan Deposito berbasis teknologi secara digitalisasi melalui mobile aplikasi.
- d. Meningkatkan dana murah Dana Pihak Ketiga (DPK).
- e. Melakukan pengkinian SOP APU PPT terkait dengan individual risk assessment.
- f. Melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko.
- g. Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal dan Audit Eksternal.

Keterangan :

Sehubungan dengan perubahan kepengurusan PT. BPR Bahtera Masyarakat saat ini telah memiliki 2 (dua) orang Komisaris berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 27 Februari 2025 yaitu mengangkat Bpk. Adhi sebagai Komisaris dan sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas berdasarkan Surat OJK No. KEP-47/KO.11/2025 tanggal 21 Februari 2025 .

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

PT. BPR Bahtera Masyarakat tidak membentuk Komite karena PT BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat menyatakan bahwa BPR wajib membentuk komite jika memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hamrizal Razali	1271032612630003	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki
2.	Handy Setyawan	3173031905760005	Tidak Memiliki	Tidak Memiliki

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hamrizal Razali	1271032612630003	-	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Handy Setyawan	3173031905760005	-	Tidak Ada	Tidak Ada



D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hamrizal Razali	1271032612630003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Handy Setyawan	3173031905760005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hamrizal Razali	1271032612630003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Handy Setyawan	3173031905760005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Rp 9.900.000.000,-	99%
2.	Adhi Triono	3174060212760011	Tidak ada	Tidak Ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	601345	PT. BPR Parinama Simfoni Indonesia	99%
				PT. Prof Manajemen Indonesia	99%
				PT. Shakti Top Finance	20%
				PT. Pulau Roku Indonesia	4%
2.	Adhi Triono	3174060212760011		Tidak Ada	Tidak Ada

F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Adhi Triono	3174060212760011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Adhi Triono	3174060212760011	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

G. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
1.	Gaji	2	Rp. 1.056.250.000,-	2	Rp. 435.000.000,-
2.	Tunjangan	-	-	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total			Rp. 1.056.250.000,-		Rp. 435.000.000,-

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit kendaraan operasional dan supir untuk direktur utama, mendapatkan fasilitas biaya bahan bakar dan Tol masing-masing per bulan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).	Komisaris Utama mendapat fasilitas biaya bahan bakar kendaraan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.
3.	Asuransi Kesehatan	Kedua Direksi mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.	Komisaris mendapat fasilitas asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.
4.	Fasilitas Lainnya	Kedua Direksi mendapat fasilitas masing-masing 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit	Kedua Dekom mendapat fasilitas tunjangan Pph 21



		handphone untuk operasional. Dan tunjangan PPh 21	
--	--	--	--

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,48 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,60 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2,00 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi	2,65 : 1

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04 Juli 2025	5 (lima) orang	1. Dekom meminta kepada direksi untuk kerjasama Channeling dengan PT Kawan Inti Indonesia (KII) untuk dipelajari lebih lanjut 2. Dekom meminta kepada direksi untuk diadakan gathering dengan nasabah deposito (Pada saat NPL dibawah 10%) 3. Vendor mobile banking bekerja sama dengan PT Intisoft Mitra Sejahtera 4. Dekom meminta kepada direksi untuk mencarikan SDB untuk penyimpanan Source Code core banking (sedang menunggu informasi ketersediaan di Bank Umum) 5. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA
2.	14 Agustus 2025	5 (lima) orang	1. Dekom meminta kepada direksi untuk mencari alternatif vendor mobile banking (dalam proses terkait harga maintenance fee tahunan) 2. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA untuk debitur PT Emerson dan Toidah



			<p>3. Dekom meminta kepada direksi untuk diadakan gathering dengan nasabah deposito (Pada saat NPL dibawah 10%)</p> <p>4. Dekom meminta kepada direksi untuk mencari Funding Officer</p>
3.	04 September 2025	5 (lima) orang	<p>1. Dekom meminta kepada direksi untuk melakukan pelatihan / sosialisasi terkait APU PPT & PPPSPM</p> <p>2. Dekom meminta kepada direksi untuk mencari Funding Officer melalui headhunter</p> <p>3. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA untuk debitur PT Emerson dan Toidah</p> <p>4. Dekom meminta kepada direksi untuk diadakan gathering dengan nasabah deposito (Pada saat NPL dibawah 10%)</p>
4.	06 Oktober 2025	5 (lima) orang	<p>1. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA untuk debitur PT Emerson, Toidah, Fandi Lesmana</p> <p>2. Dekom meminta kepada direksi untuk diadakan gathering dengan nasabah deposito (Pada saat NPL dibawah 10%)</p> <p>3. Dekom merekomendasikan untuk penunjukan KAP Tahun buku 2025 KAP Bambang, Sutjipto Ngumar dan Rekan</p> <p>4. Dekom meminta kepada direksi untuk fokus pada pencapaian RBB Tahun 2025</p>
5.	07 November 2025	5 (lima) orang	<p>1. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA, NPL dan WO untuk debitur PT Emerson, Toidah, Fandi Lesmana, R Dewi Sugiawati, Maesy, PT Momentum Indonesia Mendunia.</p> <p>2. Dekom meminta kepada direksi untuk mengalokasikan Sdm AO Lending ke penagihan untuk meningkatkan likuiditas</p> <p>3. Dekom meminta kepada direksi untuk memperbanyak agent & staff funding agar lebih produktif</p> <p>4. Dekom meminta kepada direksi untuk memberikan sanksi tegas terhadap salah satu Staff CR an Yanuar Nur Hidayat terkait kasus audit khusus mengenai adanya dokumen rekening koran debitur yang di duga palsu dan tidak di sampaikan dalam Komite Kredit</p>



6.	05 Desember 2025	5 (lima) orang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian RBB Tahun 2026 2. Dekom meminta kepada direksi untuk konsisten penyelesaian action plan terhadap asset AYDA, NPL dan WO untuk debitur PT Emersen, Toidah, Fandi Lesmana, R Dewi Sugiawati, Maesy, PT Momentum Indonesia Mendunia 3. Dekom meminta kepada direksi untuk Perangkat Pendukung Elektronik (PPE) dimasukkan dalam RBB Tahun 2026 4. Dekom meminta kepada direksi terkait perencanaan/pelaksanaan Training lebih Komprehensif untuk Tahun 2026 (mencakup elearning system berbasis cloud menggunakan google workspace atau office 365) 5. Dekom meminta kepada direksi untuk memberikan sanksi terhadap Sdr An Yanuar Hidayat berupa PHK
----	------------------	----------------	---

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronald Karamoy	3171020210840005	10	-	100%
2.	Adhi Triono	3174060212760011	10	-	100%

J. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

Untuk Penyimpangan Semester 2 tahun 2025, Nihil.



K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambilan Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	Tidak ada	-

Keterangan:

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Bahtera Masyarakat mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

M. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Keterangan:

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu baik untuk kepentingan sosial maupun kegiatan politik belum dilakukan oleh PT BPR Bahtera Masyarakat selama Semester 2 tahun 2025.

PT. BPR Bahtera Masyarakat

Jakarta, 26 Januari 2026

Signed by:


Hamrizal Razali
Direktur Utama

Signed by:


Handy Setyawan
Direktur

Mengetahui,

Signed by:


Ronald Karamoy
Komisaris Utama

Signed by:


Adhi Triono
Komisaris

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Desember 2025 PT. BPR Bahtera Masyarakat

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	0.2	0.50	0.56	0.18	1.24	0.25	Aspek Pemegang saham sudah terpenuhi, proses penerapan sebagian dipenuhi, hasil penerapan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.2	0.50	0.50	0.16	1.16	0.23	Struktur dan infrastruktur telah dipenuhi sesuai ketentuan, proses penerapan sebagian besar telah sesuai ketentuan, hasil penerapan masih terdapat kelemahan terhadap penyelesaian Kredit bermasalah sehingga NPL masih diatas ketentuan.
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.15	0.56	0.40	0.10	1.06	0.16	Pada Faktor 3 kecukupan struktur dan infrastruktur dan proses serta hasil penerapan tata kelola di BPR Bahtera Masyarakat semua indikator/kriteria telah dipenuhi
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PT. BPR Bahtera Masyarakat tidak memiliki Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite dikarenakan PT. BPR Bahtera Masyarakat memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	0.1	1.00	0.40	0.20	1.60	0.16	Sebagian besar struktur dan infastruktur telah terpenuhi dan proses penerapan sudah terpenuhinya indikator dan kriteria. Hasil penerapan sebagian besar telah terpenuhi
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0.1	0.80	0.80	0.17	1.77	0.18	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	0.1	0.70	0.80	0.15	1.65	0.17	Sebagian besar struktur dan infastruktur telah terpenuhi dan proses penerapansebagian besar sudah sudah terpenuhi. Untuk hasil penerapan sebagian besar sudah terpenuhi
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	0.03	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03	Pada Faktor 8 kecukupan struktur dan infrastruktur dan proses serta hasil penerapan tata kelola di BPR Bahtera Masyarakat semua indikator/kriteria telah dipenuhi
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.1	1.00	0.80	0.20	2.00	0.20	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	0.08	1.00	0.80	0.10	1.90	0.14	Sebagian besar Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian besar telah dipenuhi, hasil penerapan sebagai besar dipenuhi
Faktor 11: Rencana bisnis BPR	0.08	1.00	0.80	0.10	1.90	0.14	Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan sebagian dipenuhi, hasil penerapan telah dipenuhi
Faktor 12: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0.08	1.00	0.80	0.10	1.90	0.14	Sebagian besar Sudah terpenuhinya untuk struktur dan infastruktur, proses penerapan telah dipenuhi, hasil penerapan telah dipenuhi
Nilai Komposit						1.79	
Peringkat Komposit			2				Baik

PT. BPR Bahtera Masyarakat
Jakarta, 26 Januari 2026

Signed by:

E458037D-938B-42A5-BB7A-E...

Hamrizal Razali
Direktur Utama

Signed by:

2918ED45-075B-41C9-9B76-A31792B...

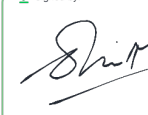
Handy Setyawan
Direktur

Mengetahui

Signed by:

E2CE5697-0EF6-43E...

Ronald Karamoy
Komisaris Utama

Signed by:

4898BE0A-98A4-41B...

Adhi Triono
Komisaris